

Daftar Partai Politik yang Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Jadwal Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

(PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Pendaftaran
(1–14 Agustus 2022).

Verifikasi administrasi (2 Agustus–11 September 2022).
Verifikasi faktual (15 Oktober–4 November 2022).

Penetapan
(14 Desember 2022).

Daftar Parpol dan Nomor Urutnya pada Pemilu 2019 (Berpeluang tidak diundi)

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| 
1 Partai Kebangkitan Bangsa | 
2 Partai Gerindra | 
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 
4 Partai Golkar | 
5 Partai NasDem | 
6 Partai Garuda | 
7 Partai Berkarya
(Tidak lolos Pemilu 2024) |
| 
8 Partai Keadilan Sejahtera | 
9 Partai Perindo | 
10 Partai Persatuan Pembangunan | 
11 Partai Solidaritas Indonesia | 
12 Partai Amanat Nasional | 
13 Partai Hanura | 
14 Partai Demokrat |

Partai Lama yang tidak Lolos pada 2019 dan Lolos pada 2024 (Berpeluang diundi)



Partai Bulan Bintang

Partai Baru yang Lolos pada 2024 (Berpeluang diundi)

- Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- Partai Buruh
- Partai Ummat

Aturan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu)

- Pasal 179 ayat (1)**
Partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta pemilu.
- Pasal 179 ayat (2)**
Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Pasal 179 ayat (3)**
Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai politik peserta pemilu.
- Pasal 179 ayat (4)**
Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

Sumber: KPU/Litbang MI/ Grafis: SENO

Prinsip Efisiensi Terpenuhi



MUHAM IRFAN

Idham Holik Komisioner KPU

BAGAIMANA posisi KPU di tengah polemik nomor urut kepesertaan partai politik (parpol) pada Pileg 2024?

Dalam pemilu serentak 2024, KPU ialah pelaksana undang-undang dan regulator teknis penyelenggaraan pemilu. Mengenai pengundian nomor urut partai politik calon peserta pemilu, hal ini diatur Pasal 137 PKPU Nomor 4/2022. Norma tersebut kami rujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 179 ayat (3).

Di sana dijelaskan penomoran partai politik itu dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan cara pengundian. Norma tersebut tidak berlaku apabila terjadi perubahan. Kewenangan melakukan perubahan undang-undang, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) itu diatur, khususnya di Pasal 20, bahwa kewenangannya ialah kewenangan atributif yang dimiliki pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah.

Saat ini pembentuk undang-undang sedang memfinalisasi Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Pemilu. Jadi nanti apa pun yang diputuskan pembentuk undang-undang berkenaan dengan nomor urut partai politik, kami akan laksanakan.

Apakah KPU mendukung jika tidak perlu mengundi ulang?

Problemnya begini, nomor urut yang digunakan pada pemilu serentak 2019 pun hasil pengundian. Sekarang hal ini dapat dianalogikan dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalam putusan Nomor 55-PUU-XVII/2020, partai politik yang pernah menjadi peserta pemilu dalam pemilu sebelumnya dan melampaui angka *parlemen threshold*, cukup diverifikasi administrasi, tidak diverifikasi faktual.

Mana yang lebih diinginkan KPU, nomor urut sama atau diundi ulang?

Pasal 3 UU Pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, salah satunya efisiensi. Jadi kalau menggunakan nomor pada peserta pemilu sebelumnya, prinsip efisiensi terpenuhi. Berkenaan dengan nomor urut yang tidak diundi, ada aspek positif, yakni masyarakat akan mudah mengingat nomor urut partai pada nomor urut sebelumnya.

Bagaimana KPU memediasi parpol baru yang merasa dirugikan jika nomor urut kepesertaan tidak diundi ulang?

Kami tidak dalam kapasitas memediasi perdebatan ini karena berada dalam ranah pembentuk undang-undang dengan publik. Jadi perdebatannya sebaiknya disampaikan saja ke pembentuk undang-undang. (Tri/P-5)

Elektabilitas Ditentukan Kerja bukan Nomor Urut

Tidak ada kaitan antara partai dan nomor urut.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

TIDAK ada nomor urut yang keramat dalam pemilihan umum (pemilu). Demikian pendapat pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno terkait dengan polemik pengundian ulang nomor urut partai politik (parpol) untuk Pemilu 2024.

Ia melihat selama ini nomor urut tidak memiliki korelasi langsung terhadap tingkat keterpilihan. Elektabilitas hanya ditentukan kerja nyata tim sukses partai politik (parpol). Nomor itu sebatas alat bantu untuk mengenali parpol.

“Jika berbicara keterpilihan, sebenarnya tidak ada kaitan antara partai dan nomor urut. Kalau nomor urut betul-betul berpengaruh pada elektabilitas, seharusnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang pada 2019 memperoleh nomor urut satu, menang tertinggi. Nyatanya tidak begitu. PKB justru ada di bawah Partai NasDem yang punya nomor urut lima,” jelas Adi kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Namun, Adi mengakui ada sejumlah partai yang seolah-olah sudah terafiliasi dengan nomor tertentu. Hal itu kemudian menjadi keuntungan yang tidak mau dilepaskan.

Ia pun menyambut baik usulan nomor urut yang dipermanenkan.

Hanya saja, itu sebaiknya tidak diberlakukan untuk Pemilu 2024. Pasalnya, saat ini pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika harus diterapkan bisa dimulai pada Pemilu 2029.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut usulan penghapusan undian ulang nomor urut parpol tidak substantif masuk ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu. Menurutnya, perppu hanya mengakomodasi masuknya empat provinsi baru, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Saat ini, ia menambahkan, penghapusan undian ulang nomor urut parpol masih dibahas di tingkat teknis dan belum ada diskusi lebih lanjut di lingkungan pemerintahan. “Nanti kita harus bicarakan juga di tingkat pemerintah juga,” jelasnya.

Tito menargetkan Perppu Pemilu bisa disahkan akhir November ini atau paling lama awal Desember. Draf perppu itu sudah dibicarakan dengan Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Magic number

PDI Perjuangan (PDIP) menilai penerapan nomor urut parpol yang sama merupakan hal rasional.

Langkah itu dinilai dapat menghemat anggaran penyelenggara untuk keperluan kampanye parpol.

“Membantu meringankan dana parpol khusus untuk APK seperti bendera partai yang mungkin masih puluhan ribu stok bendera yang bernomor partai pemilu sebelumnya,” ujar politikus PDIP Junimart Girsang dalam keterangannya yang diterima *Media Indonesia*, kemarin.

Selain itu, Junimart menilai bisa mengefisienkan beban kerja KPU. Dengan nomor parpol yang bersifat permanen, KPU tidak perlu lagi menginput ulang data parpol. Junimart mengatakan Komisi II DPR akan membahas usulan itu lebih lanjut bersama KPU.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappil) Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat setiap parpol menginginkan nomor urut yang sakti atau membawa keberuntungan dalam pemilu.

“Setiap partai menginginkan *magic number* atau *lucky number* yang memudahkan untuk membangun branding partai,” kata Kamhar kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Kamhar mengatakan pihaknya menghormati jika nantinya nomor urut parpol mengikuti gelaran pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. Meskipun ia berpandangan mestinya nomor urut parpol dikocok ulang pada gelaran Pileg 2024. (Uta/Tri/P-5)

Diskriminatif dan tidak Demokratis



ANTARA

Alif Kamal

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)

APA respons Anda terkait dengan wacana penghapusan pengundian nomor urut bagi parpol lama?

Kami menolak wacana terkait dengan tidak adanya perubahan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019. Apalagi, wacana tersebut akan diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu).

Mengapa partai Anda menolak usulan tersebut?

Kami menilai ketiadaan pengundian nomor urut parpol tersebut diskriminatif dan tidak demokratis. Parpol yang telah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam Pemilu 2024.

Apakah nomor urut menjadi hal yang krusial?

Baik partai politik baru maupun non-parlemen yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi juga berhak memperoleh nomor urut satu. Jadi, jangan ada diferensiasi antara parpol parlemen dan nonparlemen, partai lama dan partai baru.

Bagaimana progres keikutsertaan Prima pada Pemilu 2024?

Prima saat ini dalam tahap verifikasi administrasi perbaikan. Seluruh dokumen yang digunakan untuk persyaratan dan perbaikan telah diserahkan kepada KPU RI. Namun, hasil verifikasi administrasi perbaikan bukan semata-mata masalah administratif, melainkan ada faktor-faktor politik berupa upaya penjejalan partisipasi politik rakyat secara sistematis yang memengaruhi keputusan tersebut.

Partai baru merasakan adanya diskriminasi juga mulai proses verifikasi administrasi?

Seharusnya tidak ada perbedaan, partai lama pun harus verifikasi faktual. Proses verifikasi administrasi yang dilalui partai baru juga tak mudah karena peraturan yang dibuat KPU kerap berubah-ubah dan tidak sinergi dengan KPU di daerah.

Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Prima?

Kami menganggap keputusan KPU ini bukanlah keputusan final dan akhir perjuangan Prima. Kami telah berkonsultasi dengan tim hukum untuk mengajukan langkah hukum, salah satunya menggugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Uta/P-5)



ANTARA/RENO ESMIR

NOMOR URUT PARTAI: Petugas merapikan bendera peserta partai politik 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (3/7/2019). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan usulan penghapusan undian ulang nomor urut parpol tidak substantif masuk ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.

Kontestasi Politik Harus Hadirkan Kesejahteraan Masyarakat

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak warga Sumatra Selatan (Sumsel) membangun wilayahnya lebih baik ke depannya sehingga bisa menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Surya juga mengajak masyarakat Sumsel bersama-sama memenangkan NasDem pada Pemilu 2024.

"Insya Allah Herman Deru akan kembali menjadi Gubernur Sumsel dan Anies Rasyid Baswedan akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia melalui dukungan masyarakat Sumsel ini," katanya saat bersenam sehat bersama puluhan ribu masyarakat Sumsel di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, kemarin.

Surya dalam sambutannya mengatakan senam sehat tersebut memperkuat semangat masyarakat agar lebih sehat jasmani dan rohani. Ia berharap kepercayaan masyarakat akan Partai NasDem akan semakin besar dan membuat partai muda itu terus bersemangat.

"Jadi, hari ini (kemarin) kita memperkuat semangat agar lebih sehat. Semoga pertemuan kita dalam acara senam sehat ini bisa memberikan rida bagi Allah SWT untuk kemajuan Sumsel," ujarnya.

Secara terpisah, bakal calon presiden dari NasDem, Anies Baswedan, menghadiri jalan sehat bersama ribuan warga Ciamis, Jawa Barat, yang dimulai di depan pendopo Ciamis, kemarin. Anies yang didampingi Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa berkesempatan menyampaikan orasi di atas panggung, kembali menegaskan tujuannya maju dalam kontestasi politik tersebut demi menghadirkan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

"Kita ingin jangan cuma yang besar tambah besar, tapi yang kecil harus jadi besar di tanah ini," tegasnya.

Acara itu dijadikan Anies untuk memperkuat ketokohnya sebagai putra Jawa Barat. Di hadapan ribuan warga yang memadati Alun-Alun Kabupaten Ciamis, mantan Menteri Pendidikan itu menceritakan mengenai asal-usul dirinya beserta keluarga.

"Saya lahir di Kuningan, tapi nenek saya orang Ciamis. Rumah orang tua kami di Jalan Stasiun," ujarnya. (DW/BY/P-3)



BERSAMA WARGA CIAMIS:

Bakal calon presiden Partai NasDem, Anies Baswedan, berswafoto saat menghadiri jalan sehat bersama ribuan warga Ciamis, Jawa Barat, yang dimulai di depan pendopo Ciamis, Jawa Barat, kemarin. Acara rangkaian HUT ke-11 Partai NasDem itu sekaligus menjadi ajang sosialisasi bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Finalisasi RKUHP Alami Penundaan

Penundaan ini diharapkan dalam rangka mengkaji kembali masukan-masukan, baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat, untuk menyempurnakan draf revisi KUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya.

ANGGI TONDI MARTAON
redaksi@mediaindonesia.com

PEMBAHASAN final revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya dilakukan pada 21 dan 22 November 2022 mengalami penundaan. Pasalnya, ungkap Anggota Komisi III DPR Taufik Basari, pemerintah yang meminta penundaan jadwal finalisasi RUU yang saat ini

menjadi polemik di masyarakat tersebut.

"Penundaan dari pemerintah," katanya, saat dihubungi, kemarin. Menurut Ketua DPP Partai NasDem itu, dirinya tak mengetahui alasan pemerintah menunda rapat finalisasi RKUHP. Tobas, panggilan akrab Taufik, enggan berandai-andai terhadap alasan penundaan tersebut.

"Soal alasannya, sebaiknya dikonfirmasi ke pemerintah,"

ungkap dia. Menurut Taufik, pihaknya tidak keberatan dengan penundaan tersebut. Yang terpenting, ungkapnya, penundaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendalami perbaikan RKUHP.

"Berharap penundaan ini dalam rangka mengkaji kembali masukan-masukan, baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat, untuk menyempurnakan draf RKUHP dan memastikan tidak berpotensi bermasalah ke depannya," ujar dia.

Sementara itu, Jubir Tim Sosialisasi Revisi KUHP Albert Aries mengungkapkan pemerintah mengusulkan penundaan rapat finalisasi RKUHP dari 21-22 November menjadi 23 November 2022.

"Akan segera dilakukan penyelesaian pembahasan RKUHP

bersama DPR. Kemungkinan dilaksanakan pada 23 November 2022," katanya.

Disebutkan, penundaan dilakukan karena tim ingin melaporkan hasil perbaikan RKUHP ke Presiden Joko Widodo, seperti hasil sosialisasi, dialog publik, dan penyempurnaan yang dilakukan.

"Penyempurnaannya meliputi penghapusan, reformulasi, penambahan redaksional, termasuk penjelasan, dan reposisi dari draf revisi KUHP," ujar dia.

Perlu dihapus

Pada kesempatan lain, peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai pengaturan pasal penghinaan terhadap lembaga negara, termasuk presiden, dalam draf RKUHP perlu segera dihapus.

"Meningkatkan rekam jejak lem-

bagi negara dan aparaturnya yang selama ini gemar melakukan kriminalisasi, saya sanksi pasal ini tidak akan digunakan untuk membongkang kritik dan suara masyarakat," paparnya.

Biasanya, kata Hussein, delik penghinaan khusus terhadap pimpinan negara itu adanya di negara yang bentuknya kerajaan.

"Indonesia, kan, bukan kerajaan, dan Jokowi bukan raja," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Kontra, Rivanlee Anandar, tidak yakin pasal tersebut tak akan jadi alat pembongkang kritik atau kriminalisasi warga negara yang vokal terhadap presiden atau lembaga negara.

"Tidak yakin. Tanpa keberadaan pasal tersebut dalam RKUHP pun praktik pembungkaman terjadi," tegasnya. (Ykb/P-3)

Turki Pasar Potensial Komoditas Pertanian Indonesia

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) optimistis komoditas pertanian dalam negeri memiliki posisi strategis di pasar global. Beragam kebijakan telah digulirkan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor para petani. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak untuk terus memperbaiki pertanian Indonesia. Hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain.

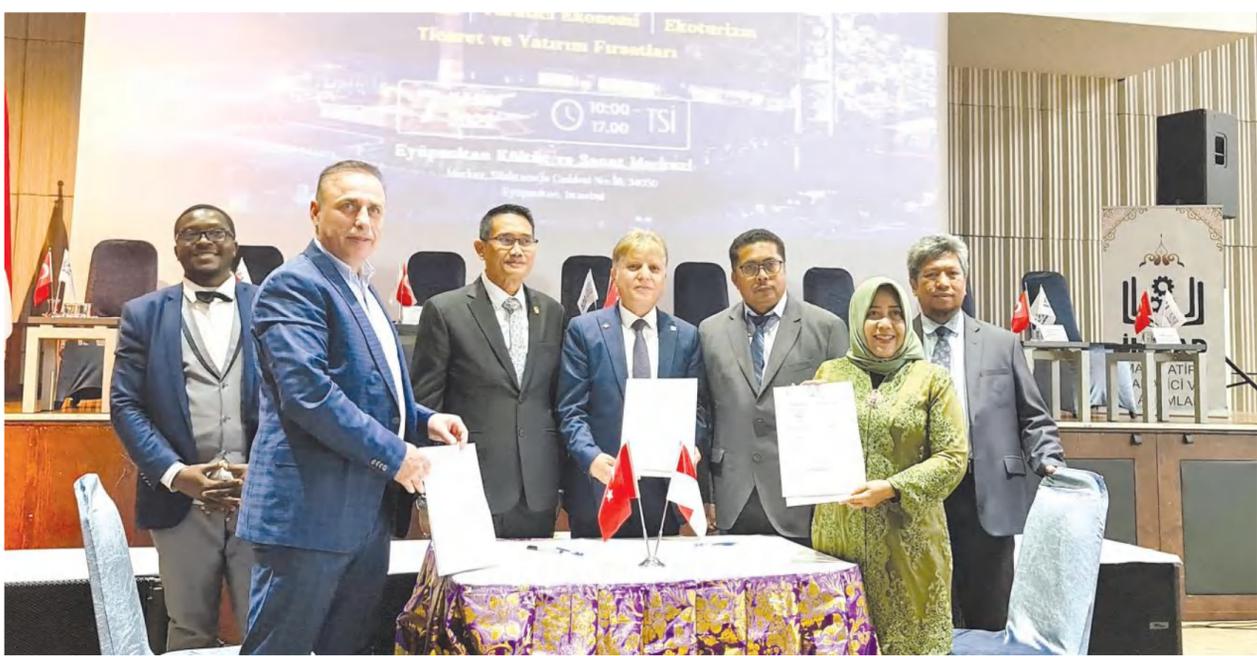
"Perlu mencari terobosan lain agar pertanian Indonesia tembus pasar global. Jika produk pertanian Indonesia banyak diekspor otomatis akan meningkatkan kualitas pertanian Indonesia dan menjaga harga pertanian tetap stabil," kata SYL.

Salah satunya membidik negara-negara yang memang potensial menjadi destinasi ekspor komoditas pertanian seperti halnya Turki. Lewat Indonesia Turki Bisnis Forum 2022, Pemerintah optimistis bisa memperluas serta menjembatani stakeholder.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Ali Jamil, mengatakan bahwa *Bussines Trade Mission* pada *MUSIAD Expo 2022* merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan kedutaan Besar di Turki. Giat ini bekerja sama dengan Musiad dan IHSIAD dalam rangka meningkatkan bisnis dagang Indonesia Turki.

"Jadi acara ini merupakan rangkaian acara Musiad Expo pada 1-5 November 2022 di Istanbul yang dihadiri lebih dari 70 Negara di dunia," ujar Ali Jamil melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/11).

Dalam ajang tahunan yang dihadiri oleh eksportir, importir, produsen hingga pe-



laku usaha kecil dan menengah, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan Hermanto sebagai perwakilan dari Kementerian Pertanian hadir dalam acara yang digelar di Istanbul itu.

Indonesia berhasil melakukan 12 penandatanganan MoU dan LoI ekspor produk di Turki. Giat ini bekerja sama dengan Musiad dan IHSIAD dalam rangka meningkatkan bisnis dagang Indonesia Turki.

"Pada acara Indonesia Turki Business Forum 2022 tersebut, total MoU dan LoI

yang terjadi pada acara tersebut mencapai 12 kerja sama ekspor Indonesia ke Turki. Produk Upland merupakan salah satu dari komoditas yang berhasil mendapat kerja sama pada event ini," kata Hermanto dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).

Lebih lanjut Hermanto mengatakan, produk upland mendapatkan enam kontrak dengan perkiraan mencapai lebih dari Rp3,6 miliar. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya permintaan dari negara lain yang hadir dalam event tersebut.

Hermanto menjelaskan, bahwa Turki merupakan pasar potensial yang dapat memasarkan produk-produk Indonesia ke kawah global. Dengan memasukkan produk

Perlu mencari terobosan lain agar pertanian Indonesia tembus pasar global. Jika produk pertanian Indonesia banyak diekspor otomatis akan meningkatkan kualitas pertanian Indonesia dan menjaga harga pertanian tetap stabil.

pertanian ke Turki secara langsung memasarkan pada sejumlah negara lain.

"Lokasi Turki yang dekat ke banyak negara membuat kesempatan pemasaran produk Indonesia ke negara lain semakin besar. Selain itu, jumlah turis Indonesia ke Turki setiap tahun meningkat sehingga kebutuhan akan produk pertanian Indonesia

Terkait produk Upland, banyak sekali pengusaha makanan dan eksportir Turki yang sangat tertarik dengan produk Upland. Faktornya antara lain karena kualitasnya yang sangat baik, harga terjangkau, serta ada jenis komoditas dan varian yang belum banyak saingannya di pasar Turki.

"Misalnya buah manggis dan olahannya, lada, kopi arabika yang merupakan jenis kopi spesial, olahan bawang merah hingga berbagai jenis beras organik seperti beras merah, hitam dan pink," cetus Ali Jamil.

Tantangan ke depan, jelas Hermanto, adalah bagaimana meningkatkan aspek logistik, dan *supply chain*, konsistensi kualitas dan kuantitas, serta koorporasi petani. "Karena itu semua amat penting da-

lam pasca panen dan peningkatan ekspor. Maka dari itu, kehadiran Upland Project diharapkan mampu meningkatkan hal-hal tadi," pungkaskannya.

KJRI sebagai fasilitator dan ikut promosi juga dalam mengusahakan pelaku bisnis di Istanbul utk mau melakukan MoU atau LoI dengan Project upland

Bisnis forum

Di lain hal, pada Kamis (10/11), Konsulat Jenderal RI (KJRI) Istanbul bekerja sama dengan IHSIAD (Asosiasi Pebisnis dan Industrialis Imam Hatip) menyelenggarakan kegiatan Indonesia-Turkiye Business Forum di Eyupsultan Kultur ve Sanay Merkezi - Istanbul. Forum bisnis ini dihadiri sekitar 150 pebisnis Turkiye dan Indonesia. Turut hadir delegasi Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK RI.

Kegiatan Forum Bisnis ini dibuka oleh Ketua IHSIAD dengan *Keynote Speech* oleh Konjen RI Istanbul. Turut juga memberikan sambutan Ketua IHSIAD Indonesia, Wakil Ketua Turk Kizilay, Wali Kota Eyupsultan dan Gubernur Distrik Eyupsultan.

Pada pameran juga dilakukan pameran produk Indonesia, pengenalan kuliner Indonesia dan *business matchmaking*.

Forum Bisnis menghasilkan penandatanganan 6 MoU dan 7 LoI dengan nilai potensi transaksi mencapai US\$2,7 juta atau sekitar Rp42 miliar per tahun.

Sektor kerja sama yang disepakati meliputi sektor agro-industri (kopi, *cocofiber*, rempah-rempah, madu dan beras organik) dan pemasaran produk antara pebisnis Indonesia dan Turkiye yang hadir. (OL-10)

Strategi Menepis Krisis

Budi Hikmat

Chief Economist PT Bahana TCW Investment Management

POLEMIK kebijakan pasca-pandemi, dan memanasnya konflik geopolitik menjadi faktor pembeda jika dibanding dengan pemacu krisis ekonomi sebelumnya, seperti pada 1998 dan 2008. Durasi, sebaran, dan keparahan krisis kali ini berisiko lebih lama, luas, dan akut mengingat lebih membutuhkan kerja sama internasional, terutama antar negara yang berseteru. Selain memerlukan kebijakan *productivity-driven growth*, keberhasilan Indonesia menyikapi gejala eksternal tergantung pada kecerdikan mengelola persaingan hegemoni global.

Cemerlang mengaruhi dunia VUCA

Sebelum pandemi covid-19 mererpa, dunia telah dibebani oleh akumulasi utang, penuaan penduduk, perubahan iklim, persaingan produsen utama energi hingga perang dagang. Ketika pandemi mererpa, kita menyaksikan pagelaran stimulus yang sangat masif, baik melalui pelonggaran moneter maupun lonjakan defisit fiskal. Stimulus ini sempat menggelembungkan harga berbagai aset seperti properti, komoditas, saham, obligasi, hingga kripto.

Namun, ketika vaksin dapat ditemukan relatif cepat yang memungkinkan pembukaan ekonomi, terjadilah ketimpangan antara permintaan dan penawaran yang luar biasa sehingga memicu lonjakan inflasi. Bahkan bagi sebagian negara, serbuan badai inflasi mencapai paras tertinggi dalam empat dekade terakhir. Pengaruh berbagai *cost-push factors* yang pelik terutama terkait upah, gangguan rantai pasok, lonjakan biaya energi dan pangan mempersulit upaya bank sentral mengendalikan inflasi.

Berbeda dengan perang yang banyak menghancurkan baik infrastruktur dan jiwa, wabah pandemi lebih memangs jiwa. Misalnya di Amerika Serikat dilaporkan sekitar satu jiwa melayang sehingga yang terjadi ialah kelangkaan relatif antara barang modal dan orang yang memicu kenaikan tingkat upah. Apa-

lagi, penerapan protokol kesehatan mempersulit mobilitas pekerja antar negara. Tingkat pengangguran Amerika Serikat 3,57% per September 2022 merupakan angka terendah selama 50 tahun terakhir.

Perang di Ukraina -- yang bagi Rusia sebagai respons *existential threat* atas ekspansi NATO -- memperberat tantangan mengendalikan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga energi dan makanan. Bank sentral AS *the Fed*, yang pada awalnya ditengarai menyangkal inflasi kemudian melakukan pengetatan paling agresif dalam sejarah. Sepanjang tahun ini, *the Fed* sudah mengerek suku bunganya 375 basis menjadi 4% yang juga diikuti oleh bank sentral lain termasuk Indonesia.

Kendati sudah mulai melambat menjadi 7,7% per Oktober 2022, tekanan inflasi di sana masih berat mengingat komponen biaya sewa dan layanan jasa belum turun. Imbal hasil T-bond dua tahun, yang digadang sebagai acuan penentuan harga surat berharga negara lain, lonjakan imbal hasil T-bond memicu kenaikan imbal hasil global, yang pada hakikatnya ongkos berutang semakin mahal. Beban banyak negara tentunya semakin berat akibat penguatan dolar, lonjakan biaya energi, dan makanan.

Dengan rasio utang terhadap PDB 103% dan kejatuhan nilai tukar pound, Inggris menjadi contoh negara yang sangat berisiko mengalami krisis utang negara. Sebelum pengetatan agresif *the Fed*, Inggris mampu menikmati ongkos berutang relatif murah dalam kisaran 1,9% untuk tenor 10 tahun. Namun, kita harus membayar lebih mahal sekitar 3,3%. Angka ini, pernah le-

bih buruk hingga 4,3% menyusul respons negatif investor atas proposal budget yang dianggap tidak kredibel, yang diajukan mantan Perdana Menteri Liz Truss.

Ada dinamika menarik pada dunia kita yang semakin bertalian satu sama lain yang perlu diketahui, merespons pengetatan agresif *the Fed* seperti yang terjadi di Jepang dan Tiongkok. Dalam upaya membantu masyarakatnya yang menua dan berutang banyak, pemerintah Jepang melakukan pengendalian imbal hasil surat berharga negara (SBN) dengan target 0,25% untuk tenor 10 tahun. Ini jelas suatu angka yang sangat kecil.

Untuk menahan lonjakan imbal hasil SBN yang memperberat warga Jepang mengelola utang mereka, bank sentral Jepang melakukan operasi intervensi beli yang memperbesar likuiditas yen. Sebagai akibatnya, terjadi pelemahan drastis yen terhadap dolar hingga 30% sepanjang tahun berjalan.

Ketika disadari pelemahan yen tersebut tidak membantu memacu ekspor, dan malah memperburuk inflasi, bank sentral Jepang melakukan intervensi yang menguras cadangan devisa. Untuk menambah pasokan dolar guna intervensi, Jepang menjual cukup besar kepemilikan mereka atas T-bond. Namun, ternyata upaya ini belum mampu memperkuat yen yang saat ini masih melemah 18%.

Tantangan dan upaya jalan keluar yang sama dilakukan oleh Tiongkok, yang juga menunjukkan penurunan cadangan devisa, posisi kepemilikan T-bond, pelemahan mata uang yuan. Yang harus diwaspadai, termasuk oleh Amerika Serikat adalah tanpa bantuan negara lain untuk kembali berinvestasi pada T-bond, 'negara Paman Sam' itu bakal tersiksa

oleh ongkos berutang yang mahal. Saat ini, utang negara AS sudah melewati angka US\$31 triliun. Terlebih, penuaan penduduk di kedua negara tersebut, akan memaksa keduanya menarik 'tabungan' mereka selama ini dalam T-bond untuk menampung pengeluaran.

Selain itu, kita juga harus mencermati dengan seksama, apakah pengetatan *the Fed* akan memicu gejala di industri keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008. Saya biasa mencermati indikator Bloomberg Financial Condition Index di Amerika Serikat dan kawasan Uni Eropa. Angka untuk kedua negara memang memburuk, terutama di Uni Eropa. Namun, tidak separah tahun 2020 dan apalagi terburuk pada 2008. Perbedaan ini, mengindikasikan Uni Eropa sebagai kawasan yang lebih berdekatan dengan perang berisiko menjadi episentrum krisis.

Para investor tampaknya mengantisipasi risiko stagflasi global (perlambatan ekonomi yang disertai dengan lonjakan inflasi), dengan meningkatkan posisi uang kas melalui penjualan berbagai *asset class* seperti saham, obligasi, hingga kripto.

Kita harus menavigasi lingkungan eksternal yang tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya yang semakin berisiko (*volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*). Dengan PDB Rusia US\$1,8 triliun, konflik di Ukraina baru semacam sampiran dalam pantun. Bobot konflik yang berisiko memicu perang terbuka melibatkan Amerika Serikat (PDB US\$23 triliun) dan Tiongkok (PDB US\$18 triliun).

Tanpa strategi internal yang efektif, lingkungan eksternal yang ganas membuat kita ringkih (*fragile*). Sayangnya, kita pernah punya pengalaman bagus saat menyikapi Oil Bonanza (1970-80) menyusul embargo OPEC yang memacu peningkatan harga minyak sekitar empat kali lipat. Saat berkebalik belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, tersiksa stagflasi, Pak Harto memanfaatkan limpahan rezeki itu untuk berbagai program be-

lana yang produktif dan inklusif. Selain membangun berbagai prasarana pedesaan, irigasi, pabrik pupuk, satelit telekomunikasi, pemerintah saat itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan dasar murah, program keluarga berencana dan transmigrasi. Sangat bisa, jadi generasi terbaik Indonesia lahir pada periode tersebut, yakni Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dengan ketimpangan terbatas.

From financing to paying the growth

Bahwa pasar modal dan nilai tukar Indonesia relatif berjaya (*outperform*), mengindikasikan berbagai strategi dan pilihan kebijakan sejauh ini mampu meredam gejala eksternal. Untuk mengantisipasi risiko krisis global di depan, kita

perlu melanjutkan berbagai reformasi struktural *productivity-driven growth* yang disarankan Bank Dunia, dalam laporannya tahun 2014 (*Indonesia: Avoiding The Trap*).

Laporan itu mengingatkan risiko Indonesia terkena fenomena 'tuwir sebelum tajir' (*growing old before growing rich*) mulai tahun 2030 saat penduduk mulai menua. Dalam taksiran Bank Dunia, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2030 baru mencapai US\$8.500 per tahun sekira pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2013-2030 mencapai rata-rata enam persen. Batas bawah PDB per kapita untuk menjadi negara maju ialah US\$12.000 per tahun.

Bank Dunia, lalu menyarankan pemerintah membenahi berbagai kekurangan infrastruktur fisik, sumber daya manusia dan kegagalan mekanisme pasar yang melandasi penurunan produktivitas dan daya saing Indonesia.

Selain memacu pembangunan infrastruktur untuk menunjang perdagangan internasional, Indonesia melakukan terobosan reformasi struktural memacu hilirisasi terutama pada sektor minerba. Upaya industrialisasi ini terbilang berhasil, bila mencermati lonjakan peringkat ekspor komoditas mineral menjadi tiga dibanding 27 pada 10 tahun lalu.

Program hilirisasi bersama kenaikan berbagai *income commodity* Indonesia (seperti batu bara, nikel, CPO dan karet) yang lebih gegas, ketimbang *cost commodity* (khususnya minyak mentah) tidak hanya memperbaiki profil neraca berjalan menjadi surplus. Namun, juga memacu penerimaan pajak negara yang penting untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar, untuk tidak langsung ditanggung oleh masyarakat yang belum lama menghadapi pandemi. Selain itu, program reindustrialisasi lebih menjanjikan dalam penciptaan kesempatan kerja.

Kondisi neraca berjalan surplus yang sangat penting untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah secara historis menjadi penentu kinerja pasar saham, untuk mampu mengalahkan bursa global. Dalam kurun waktu 2004 hingga 2012, rasio indeks harga saham gabungan Indonesia terhadap indeks saham S&P500 cenderung meningkat, yang mengindikasikan bursa kita lebih cuan. Kurun waktu ini, bersesuaian dengan posisi neraca berjalan yang cenderung surplus.

Namun, selanjutnya rasio ini menurun yang berarti bursa kita kalah cuan ketika posisi neraca berjalan menjadi defisit. Kondisi defisit neraca berjalan terbilang terparah terjadi pada tahun 2013 sekitar 3,8% PDB yang membuat rupiah lebih sensitif terhadap berita eksternal seperti Fed, yang berencana melakukan *tapering-off*. Pada tahun tersebut, rupiah anjlok sekitar 23%. Rumusnya menjadi sederhana: Defisit neraca berjalan membuat rupiah tidak punya hak kuat untuk menguat.

Memang betul ada solusi pintas menghadapi defisit neraca berjalan, dengan mencari pembiayaannya lewat kesediaan investor asing berinvestasi pada surat berharga negara dan perusahaan, serta investasi langsung. Dengan cara ini, kita menepuh strategi membiayai pertumbuhan (*financing the growth*).

Kita harus belajar dari pengalaman pahit Brasil, yang berusaha keluar dari jebakan kelas menengah, dengan menggunakan utang luar negeri. Sebab, strategi itu terbilang berbahaya bila terjadi penguatan dolar, peningkatan suku bunga global dan kejatuhan *income commodity*. Negara ini, sempat menikmati status negara maju dengan PDB per kapita US\$13.245 pada tahun 2011, sebelum kemudian merosot kini

pada kisaran US\$7500. Brasil mengalami perlambatan ekonomi drastis sejak tahun 2015.

Reindustrialisasi, guna memacu nilai tambah ekspor yang memacu surplus neraca berjalan merupakan strategi membayar pertumbuhan (*paying growth*). Surplus itu, tidak hanya memungkinkan menurunkan posisi utang luar negeri yang selama ini diperlukan untuk membiayai defisit. Namun, surplus tersebut akan meningkatkan daya beli, seperti tercermin pada peningkatan pertumbuhan M1 (uang kartal plus giral).

Umumnya, negara yang mengalami surplus menikmati rasio dana pihak ketiga perbankan terhadap GDP yang tinggi. Saat ini, rasio DPK/PDB Indonesia hanya berkisar 40%. Angka ini, jauh lebih rendah dibanding negara jiran yang umumnya di atas 130%. Dengan limpahan likuiditas tersebut, memungkinkan suku bunga mereka jauh lebih rendah ketimbang Indonesia.

Strategi *paying the growth*, memungkinkan terkendalinya penerbitan utang yang memungkinkan kita menikmati ongkos berutang lebih rendah. Baik kebijakan fiskal dan moneter perlu dipertahankan sebagai *anchor of credibility*, yakni investor asing mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang berhati-hati (*prudent*), tidak jorjoran dalam penerbitan utang, serta kurang tanggap mengantisipasi lingkungan eksternal seperti pengetatan *the Fed*. Bila membandingkan imbal hasil SBN di sejumlah negara Eropa yang berisiko mengalami pelemahan fundamental ekonomi, kita semestinya wajar berharap imbal hasil Indonesia (yang berarti ongkos berutang bagi negara) bisa lebih rendah.

Selain kualitas kebijakan ekonomi, cerahnya prospek Indonesia ditopang kecerdikan pemimpin mengelola persaingan global. Jurus 'seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak' memungkinkan Indonesia mendapatkan manfaat, seperti alokasi vaksin covid-19, baik dari Tiongkok maupun Barat. Perhelatan G-20 di Bali, dimana Indonesia menjadi tuan rumah dianggap sukses 'tidak memalukan yang tidak datang selain memulikan yang datang'. Dukungan untuk transisi Indonesia menuju *green economy*, semakin mendasak mengingat saat ini, di tengah surplus neraca berjalan, Indonesia sesungguhnya menderita defisit neraca minus terburuk dalam sejarah.

Cegah tuwir sebelum tajir

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk meraih kemakmuran. Pedoman yang serupa, semestinya dibudayakan dalam masyarakat agar memiliki cadangan untuk masa tua. Hakikatnya, sejalan dengan saran Nabi Yusuf kepada Raja yang memerjemahkan mimpi sapi kurus memakan sapi gemuk sebagai pergiliran masa malang setelah masa gemilang.

Saran Nabi Yusuf, yang diabadikan dalam QS 12:47 dapat menjadi inspirasi untuk investasi sepanjang hayat (*life-cycle investment*).

Tahapan berinvestasi disusun dalam tiga jangkauan periode: *Growth, protection and distribution*. Pada periode pertumbuhan (*growth*), masyarakat kita bimbang untuk berinvestasi dengan benar pada *asset class* seperti talenta, property, dan saham. Sementara, untuk tujuan proteksi dapat memanfaatkan SBN untuk menghadapi risiko gagal bayar, inflasi dan likuiditas. Pada fase distribusi, limpahan kekayaan yang telah diproteksi tersebut, didistribusikan secara teratur dan berkala untuk membiayai masa depan. Semacam *cash management strategy*.

Kerangka Analitis

Faktor VUCA Eksternal yang tidak Dapat Dikendalikan

- Prapandemi: Masyarakat menua, utang tinggi, perubahan iklim, strategi pangsa pasar OPEC, perdamaian panas multipolar.
- Pascapandemi: Gangguan rantai pasokan, imobilitas tenaga kerja, refluksi aset, AS sebagai produsen energi terbesar, korban dari pembalikan yang semakin ketat dan konflik geopolitik yang semakin meningkat.

Kenaikan upah, energi, dan harga pangan.

Melonjaknya biaya pinjaman dan penguatan dolar.

Strategi dan Opsi Kebijakan dalam Negeri yang Kredibel

- Pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas untuk memitigasi dampak merugikan dari gejala eksternal.
 - Menutupi kesenjangan infrastruktur dan keterampilan, pasar bekerja untuk semua.
 - Mengendalikan booming pertambangan dengan hilirisasi.
 - Memperluas dan memperdalam alat moneter.
 - Reformasi dalam industri kesehatan dan sistem jaminan sosial.
- Kepemimpinan politik: Koalisi yang efektif dan memanfaatkan persaingan geopolitik.
- Membayar, bukan membiayai pertumbuhan.

Strategi Bisnis dan Kekayaan

- Bertahan dan berjuang di Dunia VUCA: AGILE (*anticipate changes, generate confidence, initiate actions, liberate thinking, evaluate results*).
- Kapitalisasi reindustrialisasi dan transformasi hijau.
- Transformasi dari masyarakat menabung menjadi masyarakat investasi.
- Raksasa kebangkitan investor ritel.
- Lakukan transformasi dan reformasi.

Amati

- Harga energi
- Suku bunga
- Risiko kredit korporasi
- Indeks dolar

Tolok ukur

- Surplus neraca berjalan yang berkelanjutan
- Reindustrialisasi
- Kebijakan fiskal dan moneter sebagai jangkar kredibilitas

Tindakan

- Membangun ketahanan
- Berinvestasi dalam bakat
- Investasi siklus hidup
- Acuan untuk cuan
- Peluang karier

Sumber: PT Bahana TCW Investment Management

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105. (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, foto diri, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MEDIA INDONESIA

A Part of
MEDIA GROUP NETWORK

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Gaudensius Suhardi
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Ade Alawi

Dewan Redaksi Media Group:

Ketua: Eiman Saragih (merangkap anggota)
Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota)
Sekretaris: Nunung Setiyani (merangkap anggota)
Anggota: Bambang Eka Wijaya, Mohammad Mirdal Akib, Don Bosco Selamun, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, Budiaryanto, Iskandar Zulkarnain, Ade Alawi, Kania Sutisnawinata
Dewan Pengarang: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, Adrianto Machribe

Kepala Divisi Pemberitaan:

Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Henri Salomo, Jaka Budi Santosa, Mochamad Anwar Surahman, Rosmery C. Sihombing, Sadyo Kristianto (Nonaktif), Victor J.P. Nababan
Kepala Sekretariat Redaksi: Ida Farida
Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristanto, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain,

Anton Kustedja, Aries Wijaksana, Basuki Eka P. Bintang Krisanti, Dwi Tupani Gunawati, Eko Rahmawanto, Eko Suprihanto, Heryadi, Irena Shalindra, Iwan Sihombing, M. Soleh, Mirza Andreas, Raja Suhud V.H.M. Soelistsjono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indrانتان

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Astri Novaria, Atalya Puspa, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Despian Nurhidayat, Dhika Kusuma Winata, Emir Chairullah, Fathurozaq, Faustinus Nua, Ferdian Ananda Majni, Fetry Wuryasti, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Hafsan H. Salengke, Hilda Julialka, Iffa Firdausya, Indrastuti, Indriyani Astuti, Insi Nantika Jelita, M. Ilham Ramadhan Avisena, M. Iqbal Al Machmudi, Mohamad Farhan Zhuhri, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurjihadlydi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Putra Ananda, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia Octaviani, Rahmatul Fajri, Ramdani, Retno Hemawati, Rifaldi Putra Irianto, Rizki Noor Alam, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sri Utami, Sugeng Sumaryadi, Sumaryanto, Susanto, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Tri Subarkah, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, Yakub Priyatama Wijayaatmaja, Zubaedah Hanum

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Asisten Kepala Divisi: Iis Zanrika
Redaktur: Eni Kartinah
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo, Ridha Kusuma Perdana,

Bahasa:

Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonogroho, Suprianto
Staf: Farhatun Nurfitriani, Meirisa Isnaeni
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Bryjan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuji
Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Bayu Wicaksono, Dedy, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Mariansandez G, Muhammad Nasir, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hermendo, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rini Puspa Destianty, Ruggedji Tjahjono, Sento Aditya, Tutik Sunarsih
Oliah Foto: Ade Rian H, Andi Nursandi

PENGEMBANGAN BISNIS

Deputi Direktur Pengembangan Bisnis: Fitriana Saiful Bachri
Deputi Direktur Sales & Marketing: Gustaf Bernhard R
Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500;
Surabaya: (031) 5667359;
Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN

Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang)
Syarif Oebaidillah (Tangerang Selatan)
Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), Eriez M. Rizal, Bayu Anggoro (Bandung), Kisar Rajagukguk (Depok), Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Depi Gunawan (Cimah), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur),

Kristiadi (Tasikmalaya)

Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Widjajati, Ferdinand (Solo), Lilek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebese)
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ylta Himawan
Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madura)
Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh)
Sumatra Utara: Apul Iskandar (Pematangsiantar), Yoseph Pencawan, Puji Santoso (Medan), Januari Hutabarat (Taputi)
Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang)
Riau: Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru)
Kepri: Hendry Kremer (Batam)
Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang)
Bengkulu: Marlansyah
Jambi: Solmi
Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya)
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarjasin)
Sulawesi Utara: Voucke Loutaan (Manado)
Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu)
Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari)
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar)
NTB: Yusuf Riaman (Matararam)
Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta)
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang)
Maluku: Hamdi Jempot (Ambon)
Papua: Marcellinus Kelen (Jayapura)

Telepon Layanan Pembaca:

(021) 5812303
Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110
Fax Customer Service: (021) 5820476,
Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percepatan:** (021) 5812086,
di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014. **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta. **Alamat Redaksi/ Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi)
e-mail: redaksi@mediaindonesia.com,
Percetakan: Kalima Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935,
Website: www.mediaindonesia.com

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

CALAK EDU

Religiosentrisme



Ratno Lukito
Dewan Pengawas Yayasan Sukma,
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

RELIGIOSENTRISME berasal dari kata bahasa Inggris *religiocentrism*; ialah ungkapan tentang orang beragama yang menyakini bahwa agamanya sendiri lebih penting atau lebih unggul daripada agama lain (Corsini 1999: 827). Kata itu sudah digunakan sejak awal abad ke-20. Ekonom Amerika, Adrian Augustus Holtz (1917:15), misalnya, mengungkapkan bahwa awal reformasi pendidikan sekolah di Jerman masih dilakukan dengan mengizinkan sistem yang religiosentris. Hal itu sejalan dengan terminologi *Christocentric* yang memiliki makna sebagai satu bentuk kristiani yang konsentrasi terhadap ajaran Yesus Kristus, tetapi sering mempersamakan dengan religiosentris. John J Ray dan Dianne Doratis (1971:170) menerangkan bahwa secara analogi istilah religiosentrisme dipakai untuk mengartikan sentimen eksklusif berbasis agama

--keyakinan bahwa seseorang harus menikah dengan orang dari agamanya sendiri, bekerja dengan anggota agamanya sendiri, dan secara umum lebih memilih anggota agamanya sendiri daripada yang lain. Itulah alasan istilah religiosentrisme secara *ipso facto* memberikan arti merendahkan agama lain.

Memici konflik

Dengan meningkatnya keragaman agama dan kebebasan manusia, perilaku simbolis dan ekspresif keagamaan secara luas terjadi dalam bidang pendidikan, tempat kerja, platform politik, media komunikasi, dan lain-lain. Hal itulah yang dapat menyebabkan konflik antara kelompok etnik mayoritas dan minoritas dalam masyarakat multikultural (Carmella, 2011; Lawrence & King, 2008). Berbagai riset menunjukkan bahwa sikap religiosentris itu menjadi salah satu penyebab munculnya prasangka dan konflik antarkelompok mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Berbagai literatur saat ini menunjukkan efek negatif ekspresi etnosentris agama pada hubungan antarkelompok dan konsekuensi negatifnya, misal ketidakadilan, tekanan, kecemasan, ketegangan, ancaman, dan konflik. Sebagaimana dikemukakan Corsini di atas, keyakinan agama seseorang lebih penting atau lebih tinggi daripada agama lain dapat muncul karena sentimen berbasis eksklusivitas etnik. Religiosentrisme dilahirkan karena sentimen keagamaan dari keyakinan yang eksklusif. Menurut Chalfant, Beckley, dan Palmer (1994), religio-

sentrisme merujuk pada perasaan benar dan superioritas karena akibat dari afiliasi keagamaan yang menghambat kemampuan suatu masyarakat untuk mencapai adaptasi dan integrasi. Lebih jauh, hal itu dapat mencegah saling pengertian dan memicu konflik ketika tindakan intimidatif suatu kelompok agama dipandang sebagai ancaman nyata terhadap kelompok agama lain. Menurut Abu-Nimer, seorang religioelativistik meyakini bahwa agama lain berhak untuk hidup dan dipraktikkan, bahkan jika norma dan keyakinan tersebut bertentangan dengan keyakinan agamanya sendiri. Orang seperti itu tidak mudah terlibat dalam konflik atau tindakan diskriminatif terhadap penganut agama lain. Sebaliknya, seorang religiosentris adalah orang beriman, mengingkari kebenaran agama lain dan memegang kebenaran mutlak serta tidak memberikan ruang bagi praktik keagamaan yang berbeda. Orang seperti itu menjadi lebih rentan untuk mengungkapkan ujaran kebencian, tidak manusiawi, merendahkan, mengecualikan, dan mendiskriminasi kelompok dan individu agama lain. Akibatnya, paparan negatif, penghinaan, dan destruksi di lingkungan sosial, budaya, dan konteks politik dapat menimbulkan konflik di antara dua kelompok agama/etnik. Dengan mengikuti orientasi teoretis itu, beberapa penelitian menemukan bahwa ting-



kat orientasi keagamaan dan religiositas yang lebih tinggi secara signifikan berhubungan dengan konflik antarkelompok agama (Banyasz *et al.*, 2016). Berdasarkan pendekatan etnosentris agama, Patai (1954, 1987) menemukan adanya konflik agama yang luas di antara agama-agama

'teistik' dan 'nonteatistik' dalam masyarakat. Sejalan dengan hipotesis itu, beberapa penelitian telah menemukan bahwa ada kekerasan komunal yang merajalela antara umat Hindu dan Buddha di Sri Lanka, antara umat Hindu dan muslim, serta antara penganut Sikh dan Hindu di

India (Uddin, 2022).

Peran pendidikan?

Bagaimana pendidikan berperan dalam hal ini? Bagaimana kita sebagai guru bersikap dengan keyakinan religiosentrisme yang sudah mengakar dalam masyarakat? Ekspresi keagamaan melalui toleransi atau intoleransi memengaruhi konflik di antara dua kelompok agama di berbagai belahan dunia. Patai (1954: 252) merumuskan bahwa setiap agama memiliki pandangan yang pasti tentang nilainya sendiri dalam hubungannya dengan agama lain. Pandangan agama atas yang lain dapat berkisar dari toleransi sepenuhnya hingga tidak adanya toleransi sama sekali. Berdasarkan pendekatan religiosentris Patai membandingkan Timur Tengah, Timur Jauh, dan Barat dan menemukan bahwa agama di Timur Jauh sama sekali tidak ada religiosentrisme. Agama di wilayah ini ditandai dengan toleransi terhadap agama lain dan saling meminjam dan memengaruhi; di Timur Tengah dan Barat religiosentrisme sangat tinggi, penuh dengan intoleransi dan cemoohan terhadap agama lain. Tiap agama di wilayah ini bersifat eksklusif dan menganggap diri sebagai satu-satunya sistem keimanan sejati. Dari penelitian Patai di atas, kita bersyukur hidup dalam suatu daerah yang religiosentrisme termasuk rendah. Indonesia dikenal dengan daerah yang sangat plural dan multikultural sehingga sikap dan keyakinan religiosentris tidak begitu laku. Pendidikan yang baik ialah suatu proses pendidikan dengan kemampuan

untuk menanamkan kepada peserta didik akan keimanan yang mendalam, tetapi tidak memunculkan kesombongan akan keimannya tersebut. Keagamaan seseorang ditandai dengan sikap toleran terhadap agama lain, saling menghormati dan bekerja sama untuk kebahagiaan bersama. Di sinilah peran guru. Guru ialah seseorang yang diharapkan muncul darinya perasaan dan keyakinan bersama bahwa kita hidup dalam satu wadah yang plural. Menjadi seorang guru ibarat malaikat yang menyebarkan harmoni dan cinta kasih antarsesama. Perasaan tinggi diri dan kebanggaan karena keimannya tentu harus dienyahkan dengan adanya pendidikan. Keyakinan terhadap suatu kepercayaan yang memunculkan perasaan tinggi diri dan superioritas karena ajaran-ajaran yang diajarkannya harus segera dihapus dalam memori keagamaan kita. Dalam dunia yang terus mengalami perubahan, kehidupan agama pun juga berubah. Agama tidak lagi dilihat sebagai ajaran yang mendominasi kehidupan. Pun agama tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama dengan yang lain. Di sinilah letak kecerdasan manusia untuk menempatkan agama sesuai dengan situasi dan kondisinya. Memperlakukan agama dengan otonomi individu masing-masing jelas tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tepat. Seseorang yang beragama dengan kebanggaan pada dirinya tanpa merangkul orang lain mungkin justru akan berakibat buruk terhadap masa depan agama itu sendiri. Karena itu, kita harus terus mengembangkan pandangan agama religioelativistik, bukan pandangan yang religiosentris.

25 Rekomendasi Kebijakan B20 untuk KTT G20

HARI pertama B20 Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B20 (KTT B20) berlangsung di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022) dengan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan peran krusial B20 selaku *business engagement G20*. Sebagai forum dialog resmi G20 yang mewakili komunitas bisnis global, B20 bertugas memformulasikan rekomendasi kebijakan atas sejumlah isu global yang selaras dengan agenda G20. Sebagai bagian dari *engagement group G20, legacy program B20* adalah selaras dengan prioritas G20 untuk 3 agenda yaitu *global health architecture, digital transformation, dan energy transition*. Agenda hari pertama diawali dengan *Ministerial Talk bertema 'Aligning the Role of Business with G20 Priorities: To Recover Stronger, Recover Together'* dan dihadiri oleh Arifin Tasrif, Menteri ESDM; Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan; Mahendra Siregar, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves). Menko Marves Luhut menjelaskan kepada pengusaha dunia yang hadir di B20 Summit bahwa Indonesia saat ini sangat berbeda dengan belasan tahun lalu. "Ini Indonesia baru. Ke depannya, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi, sehingga tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah. Indonesia juga akan menurunkan emisi karbon dengan memprioritaskan terciptanya industri hijau," jelas Luhut. Dalam sesi pembahasan mengenai sistem investasi yang lebih adil dan efisien pasca-pandemi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dunia saat ini, selain pandemi Covid-19, juga

dihadapkan dengan krisis geopolitik antara Rusia-Ukraina. Untuk dapat pulih dari pandemi yang sempat menguncang ekonomi global, dibutuhkan sebuah terobosan konsep ekonomi yang adil, inklusif, dan sistem investasi yang berkelanjutan. Bahlil sangat mengapresiasi langkah KADIN Indonesia yang menginisiasi forum penting untuk mencari solusi terbaik untuk mempromosikan sistem ekonomi dan investasi yang adil dan inklusif. "Saat ini membangun investasi yang berkelanjutan sudah menjadi konsensus global untuk menciptakan industrialisasi yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Indonesia memiliki semua sumber daya EBT. Di Kayan, Kalimantan, ada PLTA sekitar 12 ribu MW yang sudah dibangun industri hijauanya terbesar di dunia. Di Papua, 23 ribu MW di Mamberamo," ujar Bahlil. Bahlil mengatakan Pemerintah terus berkomitmen membangun industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan sumber daya EBT. "Pemerintah menerbitkan regulasi dan kebijakan, namun pada akhirnya swasta atau pebisnis yang akan mengimplementasikan kebijakan ini. Untuk itu, ada peran yang lebih luas dari sektor swasta, salah satunya mendorong terciptanya investasi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan bagaimana kita dapat berkolaborasi mencapai tujuan target *net zero emissions*" tambah Bahlil. Selain *Ministerial Talk*, B20 Summit juga menggelar sesi dialog terkait investasi hijau untuk pertumbuhan berkelanjutan yang diisi oleh pembicara kunci yakni Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank (ADB); Mark Tucker, Group Chairman, HSBC Holdings; dan juga Datuk Tengku Muhammad Taufik, President & Group CEO, PETRONAS.



Hari pertama B20 Summit juga menjadwalkan *panel discussion* yang membahas *Realizing B20 Key Priorities and Recommendations* yang telah diformulasikan 6 Task Forces (TF) dan 1 Action Council. Panel ini terbagi dalam beberapa sesi. Sesi pertama dimulai dengan pemaparan rekomendasi dari Digitalization TF dan Integrity & Compliance (I&C) TF yang dipimpin setiap Task Force Chair, yakni Ririk Adriansyah dan Haryanto T. Budiman. Pada sesi ini ada beberapa pembicara kunci yang hadir. Di antaranya Sarda Ojiambo, Assistant Secretary-General and CEO of the UNGC; Andre Soelistyo, CEO, GoTo; Che Sidanius, Global Head of Financial Crime & Industry Affairs, London Stock Exchange Group; Michael Punkte, Vice President of Global Public Policy, Amazon Web Services; Sehat Sutardja, Co-Founder, Marvell Technology Group; dan moderator Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry (CII). Sesi kedua memaparkan rekomendasi Future of Work & Education (FoWE) TF dan Women in Business Action Council (WiBAC) yang dipimpin FoWE TF Chair, Hamdani Dzulkarnaen Salim dan WiBAC Chair, Ira Novianti. Pembicara yang hadir pada sesi ini di antaranya Maria Fernanda Garza, CEO, Orestia; Bettina Schaller, President,

World Employment Confederation; Daniel Funes de Rioja, President, Argentina Business Organisation (UIA); Michele Parmelee, President, International Organization of Employers; Zeynep Bodur Okyay, President and CEO, Kale Group; dan Meliza M Rusli, President Director, Permat Bank. Sesi ketiga, dipimpin Arif Rachmat, *Trade & Investment (T&I) Task Force Chair* bersama pembicara lainnya yakni Jeffrey Sachs, President, the UN SDSN; Axton Salim, Director, Indofood Sukses Makmur; Leon Wang, Executive Vice President, International and President, China of AstraZeneca; Myron Brilliant, Executive Vice President, US Chamber of Commerce; Vassilis Gkatzelis, President Director, HM Samporna; dan Xiang Guangda, Founder, Tsingshan Holding Group. Pembahasan sesi keempat dibuka oleh Nickie Widayati, Energy, Sustainability and Climate (ESC) TF Chair dan Ridha DM Wirakusumah, Finance and Infrastructure (F&I) TF Chair. Sesi lalu dilanjutkan dengan diskusi panel terkait pembiayaan berkelanjutan bersama Euisun Chung, Executive Chair, Hyundai Motor Group; Febriany Eddy, CEO, Vale Indonesia; Leila Fournie, CEO, Johannesburg Stock Exchange (JSE); Mohammed Y. Al Qahtani, Senior Vice President, Saudi Aramco; Seiji

Izumisawa, President and CEO, Mitsubishi Heavy Industries; Verena Lim, CEO, Macquarie Group Asia; dan John Denton, Secretary General, International Chamber of Commerce (ICC). Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN Indonesia dan Host of B20 Indonesia mengatakan melalui B20, KADIN Indonesia mencoba mengambil peran aktif untuk menyalurkan aspirasi pengusaha atau pelaku bisnis untuk mengembangkan langkah yang produktif dan inovatif demi kepentingan ekonomi secara nasional maupun global. "Kami meyakini, semua rekomendasi kebijakan dan *legacy B20* yang menjadi kunci pemulihan ekonomi global akan dijalankan, diadopsi, dan diimplementasikan oleh negara-negara G20 yang mewakili 6,5 juta komunitas bisnis internasional dan memengaruhi arah sosial ekonomi dunia serta menyumbang 80% PDB global," tambah Arsjad. Senada dengan Arsjad, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, selama setahun B20 bekerja tanpa lelah, bertemu banyak komunitas pebisnis, baik skala besar maupun kecil, dari seluruh penjuru dunia, juga pakar serta pemimpin lembaga dunia yang bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai hasil nyata dalam berbagai bentuk. "B20 Indonesia telah merancang 25 *policy recommenda-*

tion dan 68 *policy action* bagi negara G20 yang mencakup 3 aspek prioritas. Pertama, memprioritaskan inovasi untuk membuka peluang pertumbuhan pasca-pandemi. Kedua, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan. Ketiga, mendorong kolaborasi antara negara maju dan berkembang," ujarnya. **Rekomendasi Kebijakan B20 Indonesia** Terkait rumusan rekomendasi kebijakan, setiap TF merumuskan rekomendasi setelah mengidentifikasi persoalan dan tantangan. Rumusan rekomendasi kebijakannya bertujuan mengatasi kelangkaan energi dan mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan. Dari ESC TF, ada 3 rekomendasi yang dihasilkan. Yaitu meningkatkan kerja sama global dalam mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan. Sedangkan di Integrity and Compliance (I&C TF), rekomendasinya memperkuat tata kelola untuk memering risiko kejahatan dunia maya dan mengurangi risiko pencucian uang & pendanaan terorisme. Selain itu, I&C TF juga bertujuan mendorong praktik bisnis yang mengadopsi prinsip-prinsip ESG atau keberlanjutan demi masa depan bisnis dan lingkungan. Untuk itu, I&C TF merumuskan rekomendasi yang mempromosikan tata kelola berkelanjutan dalam bisnis melalui dukungan inisiatif ESG/LST. Sementara itu, rekomendasi Digitalization TF bertujuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja, mempromosikan pendidikan dan keterampilan. Tujuan rekomendasi Digitalization TF ini berhubungan sangat erat dengan FoWE TF. Adopsi teknologi dan penguasaan kemampuan digital

sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, dunia kerja atau usaha dan industri yang ke depannya akan terotomatisasi dan semakin digital. Selaras dengan Digitalization TF, tujuan rekomendasi FoWE TF mendorong penciptaan lapangan kerja, mempromosikan pendidikan dan keterampilan untuk produktivitas melalui teknologi digital. Sedangkan Trade & Investment (T&I) TF yang juga punya peran sangat krusial dan menjadi jantung dari ekonomi bisnis, memiliki tujuan mempromosikan perdagangan dan investasi global pasca-pandemi yang terbuka, adil, dan efisien. Salah satu rekomendasi utama T&I TF mempromosikan tata kelola multilateral perdagangan dan investasi global pasca-pandemi yang terbuka, adil, inklusif dan efisien melalui reformasi WTO serta mengakselerasi perdagangan dan investasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs. Lalu, Finance & Infrastructure (F&I) TF bertujuan meningkatkan akses ke pembiayaan yang terjangkau. Rekomendasinya meningkatkan akses sumber pembiayaan infrastruktur yang terjangkau, mempercepat adopsi infrastruktur digital dan memperbaiki regulasi jasa keuangan global. Terakhir, Women in Business Action Council (WiBAC) bertujuan mempercepat ketersediaan aspek pendukung bisnis yang dipimpin perempuan dan menghilangkan praktik kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Beberapa rekomendasi yang diajukan WiBAC, di antaranya memberdayakan pengusaha perempuan dan mengaktifkan kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan. Baik Arsjad maupun Shinta Kamdani mendorong semua pelaku bisnis dan Pemerintah untuk membangun momentum kerja sama dan kolaborasi yang telah dimulai oleh B20 Indonesia, untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.